

**BASIS PEMETAAN DAKWAH MASJID MELALUI PENDATAAN MASJID
DI KOTA TANGERANG**Muhammad Apri^{1*}, Muhamad Husni Rusdan², Susianti³, Dul Jalil⁴¹⁻⁴Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**

21-10-2026

Disetujui:

22-10-2026

Dipublikasi:

23-10-2026

Kata Kunci:

*Pendataan Masjid;
Pemetaan Dakwah; MUI;
Pengabdian Kepada
Masyarakat; Kota
Tangerang*

ABSTRAK

Masjid memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial. Ketersediaan data masjid yang terorganisasi diperlukan untuk menggambarkan kondisi dan potensi dakwah di suatu wilayah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendukung penyediaan basis data untuk pemetaan dakwah MUI Kota Tangerang melalui pendataan masjid oleh mahasiswa PKU STISNU Nusantara Tangerang. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus–September 2026 di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk, Kota Tangerang. Metode pelaksanaan meliputi kunjungan lapangan, observasi, komunikasi atau wawancara dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), pengisian instrumen pendataan, dokumentasi, serta pencatatan lokasi menggunakan Google Maps dan geotagging. Dari 153 masjid yang menjadi target, sebanyak 53 masjid berhasil didata atau mencapai 34,64%. Hasil pendataan menunjukkan bahwa 44 masjid (83,02%) memiliki aktivitas dakwah dan 28 masjid (52,83%) menyelenggarakan kegiatan sosial. Temuan lapangan juga mencakup kegiatan istighosah dan dzikir di Kecamatan Cibodas, kajian turats di Kecamatan Jatiuwung, serta Subuh Keliling (Subling) di Kecamatan Periuk. Data yang terkumpul memberikan informasi awal mengenai lokasi, aktivitas, dan potensi masjid yang dapat mendukung pengembangan pemetaan dakwah berbasis wilayah di Kota Tangerang. Pendataan lanjutan dan pembaruan data masih diperlukan agar cakupan informasi masjid semakin lengkap.

PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah, pendidikan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi fungsi tersebut memerlukan pengelolaan masjid yang baik agar berbagai potensi yang dimiliki dapat memberikan manfaat lebih luas bagi jamaah dan masyarakat di sekitarnya. Ridwanullah dan Herdiana (2018) menekankan pentingnya optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, sedangkan Egidiasafitri dan Kuswana (2021) membahas pengelolaan masjid berbasis kampus dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Peran pengurus masjid juga penting dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan jamaah dan lingkungan sekitarnya (Laila et al., 2023). Dengan demikian, masjid dapat dipahami bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah, melainkan juga sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan kehidupan masyarakat.



Sejalan dengan beragam fungsi tersebut, pengelolaan masjid memerlukan dukungan data yang memadai. Pengumpulan data tidak hanya diperlukan untuk mengetahui jumlah dan lokasi masjid, tetapi juga untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, sarana, kapasitas jamaah, aktivitas keagamaan, kegiatan sosial, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi setiap masjid. Data yang terorganisasi secara sistematis dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kehidupan keagamaan masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan serta arah pengembangan dakwah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ketersediaan informasi mengenai kondisi dan potensi lokal juga menjadi salah satu unsur pendukung dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran (Asaad et al., 2021; Hapsari et al., 2022; Tambunan, 2021).

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam penyediaan informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan di lapangan. Melalui pendataan, informasi mengenai identitas masjid, lokasi, pengurus, kapasitas jamaah, fasilitas, aktivitas dakwah, kegiatan sosial, potensi, kendala, dan kebutuhan pengembangan dapat dihimpun dalam suatu basis data. Informasi tersebut selanjutnya dapat diolah menjadi bahan pendukung bagi lembaga atau pihak terkait dalam merancang program pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama masyarakat. Dalam pengelolaan dakwah, informasi yang terorganisasi juga diperlukan agar perencanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah (Munir & Ilaihi, 2021).

Kebutuhan akan data semakin penting dalam konteks dakwah karena aktivitas dakwah berhadapan dengan masyarakat yang memiliki karakteristik, potensi, dan permasalahan yang beragam. Kondisi dakwah di suatu wilayah tidak selalu sama dengan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, perencanaan dakwah memerlukan pemahaman mengenai keadaan medan dakwah, karakteristik masyarakat, serta fasilitas dan lembaga keagamaan yang tersedia. Aziz (2015) menjelaskan urgensi peta dakwah sebagai salah satu sarana untuk memahami kondisi dakwah dan persoalan yang dihadapi sehingga strategi dakwah dapat dirumuskan secara lebih tepat. Informasi mengenai kegiatan dakwah, pengelolaan masjid, dan keterlibatan masyarakat dapat membantu memberikan gambaran awal mengenai kebutuhan pengembangan dakwah di suatu wilayah.

Pemetaan dakwah bukan sekadar pembuatan peta geografis, melainkan juga proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi mengenai kondisi dakwah di suatu daerah. Penelitian Yakin (2020) mengenai Peta Dakwah Kecamatan Sawangan, Kota Depok, menunjukkan relevansi pemetaan dalam menggambarkan keadaan dakwah dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan dakwah yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, kualitas dan kelengkapan data menjadi aspek penting agar informasi yang disajikan melalui pemetaan dapat digunakan sebagai bahan pendukung perencanaan program dakwah.

Ketersediaan data untuk pemetaan dakwah juga relevan dengan pengembangan fitur Peta Dakwah pada aplikasi Dakwah MUI. Qona'ati et al. (2023) membahas peran fitur tersebut dalam membangun peta dakwah di Surabaya, termasuk relevansinya bagi pemahaman dai terhadap kondisi mitra dakwah. Hal ini memperlihatkan bahwa pemetaan dakwah berkaitan dengan ketersediaan informasi yang dapat membantu memahami kondisi wilayah dan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, pendataan masjid dapat menjadi salah satu langkah awal dalam menyediakan informasi mengenai lokasi, aktivitas, dan potensi masjid yang diperlukan untuk mendukung proses pemetaan dakwah.

Perkembangan teknologi informasi turut memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pendataan dan pemetaan masjid. Informasi lokasi dapat dihubungkan dengan data geografis sehingga persebaran masjid dapat ditampilkan secara lebih sistematis. Rachman et al. (2024) membahas pengembangan sistem pemetaan masjid berbasis *Geographic Information System* (GIS) yang mengintegrasikan informasi spasial dan informasi mengenai masjid. Sementara itu, Saputri et al. (2024) mengkaji pengembangan sistem informasi geografis masjid



berbasis situs web. Kedua kajian tersebut menunjukkan relevansi teknologi geografis dalam penyediaan dan penyajian informasi lokasi masjid. Pengelolaan informasi masjid berbasis digital juga menjadi perhatian dalam kegiatan penguatan kompetensi pengurus masjid melalui pelatihan manajemen digital (Hidayat et al., 2024). Dalam kegiatan pendataan ini, pencatatan alamat, wilayah administratif, dan tautan Google Maps digunakan untuk mendukung penelusuran lokasi masjid yang berhasil didata. Namun, pencatatan melalui Google Maps tersebut merupakan bagian dari pengumpulan informasi geografis dan tidak dengan sendirinya berarti bahwa sistem informasi geografis yang terintegrasi telah dibangun.

Selain informasi lokasi dan kegiatan dakwah, aspek administratif masjid juga perlu diperhatikan. Salah satu indikator yang dihimpun dalam kegiatan ini adalah status sertifikat wakaf. Informasi tersebut dapat membantu menggambarkan kondisi administratif aset yang digunakan untuk kepentingan masjid, meskipun tidak dimaksudkan sebagai penilaian menyeluruh terhadap legalitas tanah. Wahab (2017) membahas implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf, sedangkan Masyhar et al. (2019) mengkaji sertifikasi alih nazir wakaf perorangan kepada nazir badan hukum bagi masjid dan musala. Kedua kajian tersebut memberikan konteks mengenai pentingnya aspek administrasi dan legalitas dalam pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, informasi mengenai status sertifikat wakaf dapat menjadi salah satu unsur pendukung dalam menggambarkan kondisi administratif masjid yang didata.

Kebutuhan akan data masjid yang terorganisasi menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Pendidikan Kader Ulama (PKU) STISNU Nusantara Tangerang oleh Kelompok 1. Kegiatan KKM merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan melalui keterlibatan langsung di lapangan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berinteraksi dengan pengurus masjid untuk menghimpun informasi mengenai kondisi masjid dan berbagai aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Informasi mengenai pengelolaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan masjid juga penting untuk memahami potensi pengembangan kegiatan keagamaan. Misalnya, keberadaan remaja masjid berkaitan dengan upaya pemberdayaan generasi muda melalui kegiatan berbasis masjid (Ayu et al., 2023), sedangkan pengelolaan kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan berbagai bentuk program sosial dan kelembagaan (Rizki & Siregar, 2022).

KKM Kelompok 1 dilaksanakan pada Agustus–September 2026 di Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Berdasarkan data target yang digunakan oleh kelompok, terdapat 153 masjid di ketiga kecamatan tersebut, terdiri atas 67 masjid di Kecamatan Cibodas, 33 masjid di Kecamatan Jatiuwung, dan 53 masjid di Kecamatan Periuk. Hingga tahap pelaksanaan yang dilaporkan, tim telah mendata 53 masjid atau 34,64% dari keseluruhan target. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan telah menghasilkan data awal dari sebagian masjid yang menjadi sasaran, sementara pendataan terhadap seluruh target masih perlu dilanjutkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi masjid secara langsung dan berinteraksi dengan pengurus atau narasumber yang memahami kondisi masjid. Instrumen pendataan mencakup identitas dan alamat masjid, lokasi geografis, pengurus atau narasumber, kapasitas jamaah, fasilitas, aktivitas dan frekuensi kegiatan dakwah, keberadaan remaja masjid, pendidikan anak, kegiatan sosial, potensi dakwah, kondisi umum, temuan lapangan, kendala atau permasalahan dakwah, kebutuhan pengembangan, serta rekomendasi tim KKM. Selain itu, informasi mengenai status sertifikat wakaf juga dicatat sebagai bagian dari gambaran kondisi administratif masjid. Lokasi masjid dilengkapi dengan informasi wilayah administratif dan tautan Google Maps untuk mendukung penelusuran geografis.

Pendataan tersebut tidak hanya menghasilkan daftar masjid yang telah dikunjungi, tetapi juga menyediakan informasi awal mengenai karakteristik dan potensi masjid di wilayah sasaran.



Dari 53 masjid yang telah didata, sebanyak 9 masjid atau 16,98% tercatat memiliki sertifikat wakaf. Data yang terkumpul juga menggambarkan aktivitas dakwah, keberadaan remaja masjid, pendidikan anak, kegiatan sosial, serta kelengkapan informasi lokasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami kondisi masjid yang telah didata, tetapi belum dapat dianggap mewakili keseluruhan masjid di ketiga kecamatan karena cakupan pendataan masih terbatas pada sebagian target.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pendataan masjid oleh KKM Kelompok 1 memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penyediaan informasi untuk mendukung pemetaan dakwah. Informasi mengenai identitas dan lokasi masjid, sarana, aktivitas keagamaan dan sosial, potensi, kendala, serta kondisi administratif dapat menjadi bahan awal untuk memahami karakteristik masjid dan lingkungan dakwah di wilayah sasaran. Kegiatan ini juga menunjukkan peran mahasiswa dalam membantu proses pengumpulan data lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga terkait. Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah menggambarkan pelaksanaan pendataan masjid oleh KKM Kelompok 1 PKU STISNU Nusantara Tangerang serta menjelaskan kontribusinya sebagai sumber informasi awal untuk mendukung pemetaan dakwah masjid di Kota Tangerang. Penekanan ini menempatkan pendataan sebagai langkah awal penyediaan basis informasi, bukan sebagai klaim bahwa pemetaan dakwah secara menyeluruh telah selesai dilaksanakan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Kelompok 1 Pendidikan Kader Ulama (PKU) STISNU Nusantara Tangerang pada Agustus–September 2026. Kegiatan berlokasi di tiga kecamatan di Kota Tangerang, yaitu Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Periuk. Pemilihan wilayah tersebut disesuaikan dengan pembagian wilayah pelaksanaan KKM Kelompok 1 untuk mendukung pengumpulan data masjid sebagai basis informasi bagi pemetaan dakwah.

Sasaran kegiatan ini adalah masjid dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di wilayah yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat 153 masjid yang menjadi target pendataan, terdiri atas 67 masjid di Kecamatan Cibodas, 33 masjid di Kecamatan Jatiuwung, dan 53 masjid di Kecamatan Periuk. Hingga tahap pelaksanaan yang dilaporkan, tim berhasil mendata 53 masjid.

Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan pelayanan langsung dengan berfokus pada pengumpulan data di lapangan. Mahasiswa mengunjungi masjid yang menjadi sasaran, kemudian berinteraksi dengan ketua DKM atau pengurus yang memberikan informasi mengenai kondisi masjid. Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi, wawancara atau komunikasi langsung, pengisian instrumen pendataan, dokumentasi, serta pencatatan lokasi masjid.

Instrumen pengumpulan data berupa formulir yang disusun oleh kelompok. Formulir tersebut memuat tanggal dan waktu kunjungan, anggota KKM, nama dan alamat masjid, kecamatan dan kelurahan, RT/RW, lokasi Google Maps, nama dan jabatan narasumber, kapasitas jamaah, fasilitas masjid, kegiatan dan frekuensi dakwah, keberadaan remaja masjid, kegiatan pendidikan anak, kegiatan sosial, potensi dakwah, kondisi umum masjid, temuan penting, kendala atau persoalan dakwah, kebutuhan pengembangan, serta rekomendasi dari tim KKM. Instrumen ini digunakan untuk menghimpun informasi mengenai identitas, kondisi, aktivitas, dan potensi masjid yang didata.

Pendataan juga mencakup informasi mengenai status sertifikat wakaf masjid untuk memberikan gambaran tentang aspek administratif yang tercatat dalam kegiatan. Informasi mengenai aktivitas dakwah, keberadaan remaja masjid, pendidikan anak, dan kegiatan sosial dihimpun untuk menggambarkan kondisi kegiatan serta potensi masjid di wilayah sasaran.

Setiap kunjungan diawali dengan pengenalan anggota KKM dan penjelasan mengenai tujuan kegiatan kepada pengurus masjid. Setelah memperoleh izin dari pengurus, mahasiswa mengumpulkan data berdasarkan instrumen yang telah disiapkan. Informasi lokasi masjid juga dicatat melalui Google Maps sebagai bagian dari proses geotagging, sehingga lokasi setiap masjid yang berhasil didata dapat ditelusuri kembali.



Gambar 1. Koordinasi Tim KKM dengan Pengurus DKM dalam Pendataan Masjid

Data hasil kunjungan selanjutnya direkapitulasi dan dikelompokkan berdasarkan wilayah serta indikator dalam instrumen pendataan. Data kuantitatif, seperti jumlah masjid yang telah didata, kelengkapan informasi lokasi, aktivitas dakwah, keberadaan remaja masjid, kegiatan pendidikan anak, kegiatan sosial, dan status sertifikat wakaf, disajikan dalam bentuk angka dan persentase. Sementara itu, informasi mengenai bentuk kegiatan dakwah, potensi, kendala, kebutuhan pengembangan, dan temuan lapangan diuraikan secara deskriptif berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus masjid.

Hasil rekapitulasi tersebut digunakan untuk menggambarkan capaian pendataan, profil kegiatan dan potensi dakwah masjid, kelengkapan informasi geografis, serta kondisi status sertifikat wakaf pada masjid yang berhasil didata. Data yang terkumpul menjadi informasi awal untuk mendukung pengembangan pemetaan dakwah di Kota Tangerang. Pendataan ini belum mencakup seluruh 153 masjid yang menjadi target sehingga masih diperlukan pendataan lanjutan untuk melengkapi cakupan informasi masjid di ketiga kecamatan.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok 1

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan
1	Persiapan	Melakukan koordinasi kelompok, membagi tugas dan wilayah pendataan, serta menyiapkan instrumen pendataan masjid.
2	Koordinasi	Melakukan komunikasi dan menyesuaikan jadwal kunjungan dengan pengurus atau DKM masjid yang menjadi sasaran.
3	Kunjungan Lapangan	Mengunjungi masjid secara langsung serta menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada pengurus DKM.
4	Pengumpulan Data	Menghimpun informasi mengenai identitas, kondisi, aktivitas, potensi dakwah, dan status sertifikat wakaf masjid melalui observasi serta komunikasi dengan pengurus berdasarkan instrumen yang telah disiapkan.

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan
5	Geotagging	Mencatat alamat, wilayah administratif, dan lokasi masjid melalui Google Maps sebagai informasi geografis.
6	Rekapitulasi Data	Mengumpulkan dan mengelompokkan data hasil kunjungan berdasarkan wilayah serta indikator yang telah ditentukan.
7	Penyajian dan Analisis Data	Menyajikan data kuantitatif dalam bentuk angka dan persentase serta menguraikan informasi mengenai aktivitas dan potensi masjid secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Pendataan Masjid

Pendataan masjid merupakan salah satu aktivitas utama KKM Kelompok 1 PKU STISNU Nusantara Tangerang untuk mendukung penyediaan basis data bagi pemetaan dakwah MUI Kota Tangerang. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke masjid-masjid yang menjadi target di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk, disertai komunikasi dan pengumpulan informasi dari pengurus atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Berdasarkan data target, terdapat 153 masjid di tiga kecamatan yang menjadi wilayah kerja Kelompok 1. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 masjid berhasil didata sehingga capaian pendataan mencapai 34,64%.



Gambar 2. Proses Pendataan dan Wawancara dengan Pengurus Masjid

Tabel 2. Capaian Pendataan Masjid Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Total Masjid	Sudah Didata	Belum Didata	Capaian
1	Cibodas	67	23	44	34,33%
2	Jatiuwung	33	7	26	21,21%
3	Periuk	53	23	30	43,40%
Total		153	53	100	34,64%

Berdasarkan Tabel 2, Kecamatan Periuk mencatat capaian pendataan tertinggi, yaitu 43,40% atau 23 dari 53 masjid. Kecamatan Cibodas mencapai 34,33%, dengan 23 dari 67 masjid telah didata, sedangkan Kecamatan Jatiuwung mencapai 21,21%, dengan 7 dari 33 masjid telah didata.

Secara keseluruhan, masih terdapat 100 masjid yang belum terdata pada tahap pelaksanaan yang dilaporkan. Perbedaan capaian antarkecamatan menunjukkan bahwa proses pendataan belum berjalan dengan tingkat penyelesaian yang sama di setiap wilayah. Oleh karena itu, pendataan lanjutan memerlukan pengaturan waktu, pembagian wilayah kerja, dan koordinasi yang berkelanjutan agar target pendataan dapat diselesaikan secara bertahap.

Kunjungan langsung juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai kondisi masjid berdasarkan keterangan pengurus dan hasil pengamatan di lapangan. Informasi tersebut mencakup kegiatan keagamaan, partisipasi masyarakat, sarana, serta kebutuhan pengembangan masjid. Dengan demikian, hasil pendataan pada 53 masjid ini menjadi data awal untuk mengenali kondisi dan potensi dakwah di wilayah sasaran, sekaligus dapat dilengkapi melalui pendataan lanjutan terhadap masjid-masjid yang belum terjangkau.

Profil dan Potensi Dakwah Masjid Berdasarkan Kecamatan

Pendataan yang dilakukan oleh KKM Kelompok 1 bertujuan tidak hanya untuk mengetahui posisi dan lokasi masjid, tetapi juga untuk memperoleh gambaran mengenai profil, kegiatan, serta potensi dakwah masjid di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk. Pendekatan ini didasarkan pada peran masjid yang tidak terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas dakwah, pendidikan, pengembangan generasi muda, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Ridwanullah & Herdiana, 2018).



Gambar 3. Wawancara dan Pencatatan Data Bersama Pengurus Masjid

Dari hasil pendataan terhadap 53 masjid, sebanyak 44 masjid (83,02%) tercatat memiliki kegiatan dakwah, sedangkan 32 masjid (60,38%) melaksanakan kegiatan dakwah secara teratur. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah merupakan salah satu aspek penting dalam profil masjid yang telah didata. Meskipun jenis aktivitas dakwah yang dilakukan berbeda-beda, hasil pendataan mengidentifikasi beberapa bentuk kegiatan di masing-masing kecamatan. Informasi ini dapat menjadi data pendukung dalam penyusunan Peta Dakwah MUI Kota Tangerang, yang diharapkan tidak hanya menggambarkan persebaran masjid, tetapi juga memberikan informasi mengenai aktivitas dakwah di dalamnya (Aziz, 2015; Qona'ati et al., 2023).

Di Kecamatan Cibodas, salah satu bentuk kegiatan yang ditemukan adalah istighosah dan dzikir. Aktivitas tersebut merupakan bentuk kegiatan keagamaan yang dapat menjadi sarana pembinaan spiritual dan memperkuat hubungan sosial antarjamaah. Temuan ini memberikan gambaran mengenai kegiatan keagamaan yang tercatat di masjid-masjid wilayah Cibodas dan



dapat menjadi informasi awal dalam mengidentifikasi potensi pembinaan spiritual masyarakat setempat.

Di Kecamatan Jatiuwung, salah satu kegiatan yang ditemukan adalah kajian turats, yaitu kajian yang berkaitan dengan literatur keislaman klasik. Kegiatan ini menunjukkan adanya aktivitas dakwah yang berorientasi pada pembelajaran dan pendalaman pengetahuan keislaman. Keberadaan kajian turats dapat menjadi salah satu informasi mengenai potensi pendidikan keagamaan di masjid-masjid wilayah Jatiuwung.

Sementara itu, di Kecamatan Periuk ditemukan kegiatan Subling (Subuh Keliling), yaitu kegiatan dakwah yang dilaksanakan dengan mengunjungi masjid secara bergantian. Kegiatan ini berpotensi mendukung interaksi antara jamaah dan pengurus masjid serta membangun jejaring dakwah antarmasjid di wilayah tersebut. Pencatatan kegiatan Subling menjadi salah satu informasi yang dapat memperkaya gambaran mengenai aktivitas dakwah masjid di Kecamatan Periuk.

Berdasarkan hasil pendataan tersebut, kegiatan yang teridentifikasi memiliki variasi antarkecamatan, antara lain istighosah dan dzikir di Cibodas, kajian turats di Jatiuwung, serta Subling di Periuk. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pengumpulan data yang tidak hanya mencakup identitas dan lokasi masjid, tetapi juga jenis kegiatan dakwah yang dilaksanakan. Informasi tersebut dapat mendukung penyusunan Peta Dakwah MUI Kota Tangerang agar pemetaan tidak hanya memperlihatkan persebaran masjid secara geografis, tetapi juga memberikan gambaran mengenai aktivitas keagamaan yang tercatat di dalamnya. Namun, temuan tersebut perlu dipahami sebagai gambaran awal berdasarkan masjid yang telah didata, bukan sebagai representasi seluruh masjid di masing-masing kecamatan.

Data yang terkumpul juga menunjukkan bahwa 37 masjid (69,81%) memiliki kelompok remaja masjid. Keberadaan kelompok ini memberikan gambaran awal mengenai wadah partisipasi generasi muda dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan keagamaan. Remaja masjid dapat berperan dalam mendukung keberlanjutan aktivitas dakwah dan regenerasi pengelolaan kegiatan masjid. Oleh karena itu, informasi mengenai keberadaan kelompok remaja masjid perlu menjadi salah satu unsur yang dicatat dalam pemetaan potensi dakwah.

Dalam bidang pendidikan, sebanyak 33 masjid (62,26%) tercatat menyelenggarakan program pendidikan anak. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masjid yang telah didata juga menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi anak-anak. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai peran masjid dalam mendukung pendidikan agama bagi generasi muda, sekaligus menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kegiatan masjid.

Sementara itu, sebanyak 28 masjid (52,83%) dari 53 masjid yang telah didata tercatat menjalankan kegiatan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa masjid yang didata tidak hanya melaksanakan aktivitas ibadah dan dakwah, tetapi juga berperan dalam kegiatan sosial masyarakat di sekitarnya. Salah satu bentuk kegiatan sosial yang ditemukan adalah penyaluran bantuan kepada anak yatim dan kaum dhuafa. Kegiatan tersebut mencerminkan kepedulian sosial masjid terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan serta menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat berbagi dan perhatian antarjamaah. Informasi mengenai kegiatan sosial ini penting untuk dimasukkan dalam Peta Dakwah MUI Kota Tangerang karena dapat memberikan gambaran mengenai peran sosial masjid selain aktivitas keagamaannya. Potensi tersebut juga relevan dengan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis masjid (Ridwanullah & Herdiana, 2018).

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa masjid yang telah didata memiliki variasi aktivitas, mulai dari dakwah, pembinaan generasi muda, pendidikan anak, hingga kegiatan sosial.

Variasi ini memberikan gambaran awal mengenai beragam fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat. Sebagian masjid tercatat memiliki kegiatan dakwah, sementara masjid lainnya juga memiliki kelompok remaja, program pendidikan anak, dan kegiatan sosial. Seluruh informasi tersebut dapat membantu menggambarkan potensi masjid berdasarkan data yang berhasil dihimpun.

Karakteristik tersebut menjadi informasi penting dalam proses pemetaan dakwah. Pemetaan tidak hanya perlu menunjukkan jumlah dan lokasi masjid, tetapi juga mempertimbangkan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Informasi mengenai aktivitas dakwah, keberadaan kelompok remaja masjid, pendidikan anak, dan kegiatan sosial dapat menjadi bagian dari basis data untuk memahami potensi dakwah di setiap wilayah. Dengan demikian, pihak terkait dapat memperoleh gambaran yang lebih informatif mengenai kondisi lapangan dan kebutuhan pengembangan dakwah (Aziz, 2015; Qona'ati et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, pendataan yang dilakukan oleh KKM Kelompok 1 memiliki fungsi lebih luas daripada pencatatan administratif. Informasi yang diperoleh dari 53 masjid dapat menjadi landasan awal untuk menggambarkan karakteristik dan potensi dakwah masjid di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk. Data tersebut masih perlu diperluas melalui verifikasi, pembaruan, dan penggabungan dengan data masjid lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dakwah di Kota Tangerang.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa mayoritas masjid yang menjadi objek kegiatan telah memiliki aktivitas dakwah. Selain itu, keberadaan kelompok remaja masjid, program pendidikan anak, dan kegiatan sosial memperlihatkan adanya potensi pengembangan fungsi masjid yang beragam. Dengan demikian, pendataan masjid merupakan salah satu langkah awal dalam membangun basis informasi yang dapat mendukung penyusunan Peta Dakwah MUI Kota Tangerang.

Geotagging dan Pemetaan Lokasi Masjid

Salah satu aspek penting dalam kegiatan pendataan masjid yang dilaksanakan oleh KKM Kelompok 1 adalah pencatatan lokasi masjid menggunakan geotagging. Pencatatan lokasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data masjid yang dikumpulkan dilengkapi dengan informasi geografis yang dapat ditelusuri kembali. Dengan demikian, kegiatan pendataan tidak hanya menghasilkan informasi mengenai identitas dan kondisi masjid, tetapi juga memberikan gambaran mengenai persebaran masjid berdasarkan lokasi.

Pada instrumen pengumpulan data yang digunakan, informasi geografis masjid mencakup alamat lengkap, kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan tautan Google Maps. Informasi tersebut menjadi bagian dari basis data masjid yang dihimpun oleh tim KKM. Pencatatan komponen lokasi ini memungkinkan setiap masjid yang telah didata diidentifikasi berdasarkan wilayah keberadaannya dan membantu proses penelusuran kembali apabila diperlukan verifikasi atau pembaruan data.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, seluruh 53 masjid yang telah dikunjungi dilengkapi dengan informasi lokasi melalui geotagging. Dengan demikian, kelengkapan geotagging pada masjid yang berhasil didata mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi lokasi telah tersedia pada seluruh data masjid yang dikumpulkan dalam kegiatan tersebut.

Tabel 3. Kelengkapan Geotagging Masjid

Keterangan	Jumlah	Persentase
Masjid yang telah didata dan memiliki geotagging	53	100%
Total masjid yang telah didata	53	100%

Kelengkapan geotagging menjadi salah satu aspek penting dalam hasil pendataan karena setiap informasi mengenai masjid dapat dihubungkan dengan lokasi geografisnya. Informasi lokasi tersebut juga memudahkan penelusuran kembali apabila diperlukan verifikasi atau pembaruan data pada tahap berikutnya.

Dalam konteks pemetaan, data geografis dapat digunakan untuk menggambarkan persebaran masjid berdasarkan wilayah. Data spasial tersebut dapat dipadukan dengan data nonspasial yang dihimpun melalui instrumen pendataan, seperti kapasitas jamaah, fasilitas, aktivitas dakwah, kegiatan sosial, potensi dakwah, dan kondisi administratif masjid. Penggabungan kedua jenis data ini dapat menghasilkan basis informasi yang lebih menyeluruh mengenai kondisi masjid di wilayah sasaran. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan sistem informasi geografis dalam pengembangan sistem pemetaan masjid (Rachman et al., 2024).

Geotagging juga memberikan manfaat karena informasi masjid dapat disajikan tidak hanya dalam bentuk tabel atau daftar, tetapi juga berpotensi ditampilkan dalam peta persebaran lokasi. Titik lokasi setiap masjid dapat menjadi dasar untuk menggambarkan sebaran masjid di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk serta mendukung penyusunan Peta Dakwah MUI Kota Tangerang. Namun, kelengkapan data lokasi perlu dibedakan dari tersedianya peta dakwah yang telah selesai disusun. Hasil yang dapat dipastikan dari kegiatan ini adalah bahwa 53 masjid yang berhasil didata telah memiliki informasi geotagging.

Dalam kegiatan pemetaan dakwah, data lokasi akan semakin bermanfaat apabila dipadukan dengan informasi mengenai karakteristik dan potensi setiap masjid. Sebagai contoh, lokasi masjid dapat dihubungkan dengan informasi mengenai kegiatan dakwah, keberadaan kelompok remaja masjid, program pendidikan anak, kegiatan sosial, dan kebutuhan pengembangan. Penggabungan informasi tersebut dapat membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai lokasi masjid sekaligus aktivitas dakwah yang tercatat di dalamnya.

Berdasarkan hasil tersebut, geotagging tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi pendataan, tetapi juga sebagai komponen pendukung pembentukan basis data masjid yang memuat informasi spasial. Ketersediaan informasi lokasi pada seluruh 53 masjid memberikan dasar awal bagi proses verifikasi, pembaruan, dan pengembangan data untuk mendukung pemetaan masjid serta potensi dakwah secara lebih terencana. Dengan demikian, kegiatan KKM Kelompok 1 telah menghasilkan data 53 masjid yang seluruhnya dilengkapi dengan geotagging atau mencapai tingkat kelengkapan 100%. Informasi ini melengkapi data mengenai profil, kondisi, aktivitas, dan potensi masjid yang telah dihimpun selama kegiatan pendataan.

Kondisi Status Tanah dan Sertifikat Wakaf Masjid

Selain mengumpulkan informasi mengenai lokasi, kondisi, dan aktivitas dakwah masjid, kegiatan pendataan KKM Kelompok 1 juga mencakup informasi mengenai status tanah masjid. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal tentang kondisi administratif tanah yang digunakan oleh masjid. Aspek tersebut penting dicatat karena masjid dapat memiliki status tanah yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan dokumen yang dimiliki atau diketahui oleh pengurus masing-masing.

Dari hasil pendataan terhadap 53 masjid, sebanyak 9 masjid (16,98%) tercatat telah memiliki sertifikat wakaf. Sementara itu, 44 masjid lainnya (83,02%) tercatat dalam kategori status tanah lainnya. Angka tersebut perlu difafsirkan secara hati-hati. Data ini tidak dapat langsung diartikan bahwa 44 masjid tersebut tidak memiliki sertifikat wakaf, karena informasi yang tersedia belum merinci status tanah masing-masing masjid dalam kelompok tersebut.

Tabel 4. Status Tanah dan Sertifikat Wakaf Masjid

Keterangan	Jumlah	Persentase
Memiliki sertifikat wakaf	9	16,98%
Status tanah lainnya	44	83,02%
Total masjid yang didata	53	100%

Informasi mengenai status tanah merupakan salah satu komponen penting dalam pendataan masjid. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa informasi administratif tanah yang tercatat pada masjid-masjid tersebut tidak seluruhnya berada dalam kategori sertifikat wakaf. Oleh karena itu, pengumpulan data secara langsung melalui komunikasi dengan pengurus masjid menjadi bagian penting untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing masjid.

Bagi masjid yang telah memiliki sertifikat wakaf, informasi tersebut dapat dicatat sebagai bagian dari dokumentasi administratif mengenai tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Sertifikasi tanah wakaf juga berkaitan dengan aspek administrasi dan kebijakan pengelolaan tanah wakaf, sebagaimana dibahas oleh Wahab (2017). Meskipun demikian, keberadaan informasi sertifikat dalam hasil pendataan ini tidak dengan sendirinya menjadi penilaian menyeluruh atas status hukum tanah setiap masjid.

Sementara itu, kategori status tanah lainnya tetap perlu dipertahankan sebagai informasi hasil pendataan. Karena rincian status tersebut belum disajikan dalam data yang tersedia, belum dapat ditentukan secara lebih spesifik bentuk status tanah yang dimiliki atau digunakan oleh 44 masjid tersebut. Informasi lanjutan mengenai dokumen dan status tanah masing-masing masjid dapat dikonfirmasi apabila dilakukan verifikasi atau pembaruan data pada tahap berikutnya.

Pencatatan status tanah juga memperkaya profil masjid karena informasi tersebut dapat dipadukan dengan data lain yang telah dihimpun, seperti lokasi, fasilitas, kapasitas jamaah, kegiatan dakwah, aktivitas sosial, dan potensi masjid. Dengan demikian, basis data yang dihasilkan tidak hanya memuat informasi mengenai keberadaan dan aktivitas masjid, tetapi juga mencakup aspek administratif yang relevan untuk memahami kondisi masjid secara lebih komprehensif.

Dalam kegiatan pengabdian ini, informasi mengenai status tanah tidak dimaksudkan untuk menilai legalitas setiap masjid, melainkan sebagai bagian dari pencatatan kondisi lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus masjid. Batasan ini penting agar hasil pendataan tetap objektif dan tidak menghasilkan kesimpulan yang melampaui informasi yang tersedia. Jika data tersebut akan digunakan untuk kebutuhan administratif lebih lanjut, informasi mengenai status tanah dapat diverifikasi berdasarkan dokumen yang relevan.

Dengan demikian, dari 53 masjid yang telah didata, sebanyak 9 masjid (16,98%) tercatat memiliki sertifikat wakaf, sedangkan 44 masjid (83,02%) berada dalam kategori status tanah lainnya yang belum dirinci dalam hasil pendataan ini. Temuan tersebut menjadi bagian dari profil administratif masjid yang melengkapi basis data hasil kegiatan KKM Kelompok 1 dan dapat mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai kondisi masjid di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk.

Pendataan Masjid sebagai Basis Pemetaan Dakwah

Pendataan masjid oleh KKM Kelompok 1 tidak hanya bertujuan mencatat identitas dan keberadaan masjid, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan potensi dakwah di wilayah sasaran. Pendekatan ini penting karena setiap masjid memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kegiatan keagamaan, fasilitas, jumlah jamaah, keterlibatan generasi muda, pendidikan, dan aktivitas sosial. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat menjadi bagian dari basis informasi untuk memahami kondisi dakwah secara lebih terstruktur.



Pemetaan dakwah membutuhkan data yang dapat menggambarkan kondisi medan dakwah secara nyata. Informasi tersebut tidak hanya mencakup lokasi, tetapi juga berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan dan potensi dakwah. Dalam konteks ini, pendataan masjid menjadi salah satu langkah awal karena masjid merupakan tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan sekaligus interaksi sosial masyarakat. Data masjid dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dakwah di tingkat lokal dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan pengembangannya (Aziz, 2015).

Data hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 153 masjid yang menjadi target di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk, sebanyak 53 masjid (34,64%) berhasil didata. Data tersebut dilengkapi informasi lokasi melalui geotagging serta keterangan mengenai profil dan aktivitas masjid. Dari 53 masjid yang telah didata, sebanyak 44 masjid (83,02%) tercatat memiliki kegiatan dakwah dan 32 masjid (60,38%) melaksanakan kegiatan dakwah secara teratur. Selain itu, 37 masjid (69,81%) memiliki kelompok remaja masjid, 33 masjid (62,26%) menyelenggarakan program pendidikan anak, dan 28 masjid (52,83%) melaksanakan kegiatan sosial.

Data tersebut menunjukkan bahwa pendataan memberikan gambaran yang lebih luas dibandingkan pencatatan yang hanya mencakup nama dan alamat masjid. Informasi mengenai kegiatan dakwah, keberadaan remaja masjid, pendidikan anak, dan kegiatan sosial membantu menggambarkan variasi aktivitas yang ditemukan pada masjid yang telah didata. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan awal untuk mengenali karakteristik dan potensi dakwah di wilayah sasaran.

Selain aktivitas yang telah berlangsung, instrumen pendataan juga mencakup informasi mengenai potensi dakwah, tantangan atau permasalahan dakwah, serta kebutuhan pengembangan. Informasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kegiatan dakwah. Namun, pemanfaatannya untuk menentukan kebutuhan program lanjutan perlu didasarkan pada penelaahan lebih lanjut terhadap data yang terkumpul.

Informasi lokasi yang dihimpun melalui geotagging turut memberikan dimensi spasial pada hasil pendataan. Seluruh 53 masjid yang berhasil didata dilengkapi dengan informasi lokasi melalui Google Maps. Data ini memungkinkan informasi mengenai masjid dihubungkan dengan wilayah administratif dan posisi geografisnya. Dengan demikian, informasi mengenai aktivitas dan potensi dakwah dapat dipahami berdasarkan lokasi masjid masing-masing.

Integrasi data spasial dan nonspasial merupakan bagian penting dalam pengembangan basis data pemetaan dakwah. Data lokasi menunjukkan letak masjid, sedangkan data mengenai kegiatan, potensi, dan kondisi masjid memberikan informasi tentang karakteristiknya. Penggabungan kedua jenis informasi tersebut dapat menghasilkan gambaran yang lebih terstruktur mengenai kondisi masjid di suatu wilayah. Rachman et al. (2024) membahas pengembangan sistem pemetaan masjid berbasis *Geographic Information System* (GIS), yang relevan dengan pemanfaatan informasi lokasi dalam penyusunan data pemetaan masjid.

Pendataan oleh KKM Kelompok 1 juga mencakup informasi mengenai status tanah dan sertifikat wakaf. Dari 53 masjid yang telah didata, sebanyak 9 masjid (16,98%) tercatat memiliki sertifikat wakaf, sedangkan 44 masjid (83,02%) masuk dalam kategori status tanah lainnya yang belum dirinci dalam hasil pendataan. Informasi tersebut melengkapi profil masjid dari sisi administratif. Meskipun bukan indikator langsung aktivitas dakwah, data administratif dapat menjadi bagian dari informasi pendukung untuk memahami kondisi masjid. Pencatatan ini tidak dimaksudkan untuk menilai legalitas tanah setiap masjid, melainkan mendokumentasikan informasi yang diperoleh selama kegiatan pendataan.

Kontribusi kegiatan ini juga terlihat dari keterlibatan mahasiswa dalam memperoleh informasi secara langsung melalui komunikasi dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid



(DKM). Proses tersebut memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenali kondisi masjid dan masyarakat berdasarkan informasi lapangan. Selain mengumpulkan data, mahasiswa berperan dalam menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pemetaan dakwah MUI Kota Tangerang.

Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menjadi bentuk keterlibatan mahasiswa dalam mendukung kebutuhan pendataan di tingkat lokal. Pengumpulan informasi secara langsung menghubungkan pelaksanaan kegiatan akademik dengan kebutuhan institusi dan masyarakat. Data yang dihimpun diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami kondisi masjid dan merencanakan pengembangan dakwah sesuai dengan informasi yang tersedia.

Pemanfaatan basis data tersebut selanjutnya memerlukan proses verifikasi, pembaruan, dan integrasi dengan data masjid lainnya. Data yang dikumpulkan selama kegiatan KKM merupakan gambaran awal berdasarkan masjid yang berhasil dijangkau. Oleh karena itu, pengembangan pemetaan dakwah perlu dilanjutkan melalui pembaruan berkala agar informasi yang tersedia tetap sesuai dengan kondisi masjid dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pendataan yang dilakukan oleh KKM Kelompok 1 menghasilkan informasi mengenai lokasi, profil, aktivitas dakwah, pendidikan anak, kelompok remaja masjid, kegiatan sosial, potensi, tantangan, kebutuhan pengembangan, serta status administratif masjid. Dari 153 masjid yang menjadi target, sebanyak 53 masjid berhasil didata. Capaian ini menjadi langkah awal dalam membangun basis informasi untuk mendukung pemetaan dakwah MUI Kota Tangerang. Meskipun cakupan pendataan masih perlu diperluas, informasi yang telah dihimpun dapat menjadi bahan awal untuk memahami karakteristik masjid di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk serta mendukung pengembangan pemetaan dakwah pada tahap berikutnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian KKM Kelompok 1 PKU STISNU Nusantara Tangerang dilaksanakan pada Agustus–September 2026 di Kecamatan Cibodas, Jatiuwung, dan Periuk, Kota Tangerang, melalui pendataan masjid sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan Peta Dakwah MUI Kota Tangerang. Dari 153 masjid yang menjadi target pendataan, sebanyak 53 masjid atau 34,64% telah berhasil dicatat. Data yang dikumpulkan mencakup identitas dan lokasi masjid, kapasitas jamaah, sarana, aktivitas dan frekuensi kegiatan dakwah, keberadaan remaja masjid, pendidikan anak, kegiatan sosial, potensi dakwah, hambatan, kebutuhan pengembangan, serta kondisi administratif masjid. Seluruh 53 masjid yang telah didata juga dilengkapi informasi lokasi melalui geotagging sehingga memiliki informasi geografis yang dapat mendukung proses pemetaan. Hasil pendataan menunjukkan bahwa 44 masjid (83,02%) memiliki aktivitas dakwah, 32 masjid (60,38%) melaksanakan kegiatan dakwah secara teratur, 37 masjid (69,81%) memiliki remaja masjid, 33 masjid (62,26%) menyelenggarakan pendidikan anak, dan 28 masjid (52,83%) mengadakan kegiatan sosial. Selain itu, terdapat 9 masjid (16,98%) yang telah memiliki sertifikat wakaf, sedangkan masjid lainnya memiliki status tanah yang beragam dan belum dirinci lebih lanjut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendataan masjid dapat menjadi landasan informasi awal untuk mendukung pemetaan dakwah di Kota Tangerang karena menyediakan gambaran mengenai persebaran masjid, aktivitas, potensi, dan kondisi masing-masing masjid. Namun, pendataan ini masih perlu dilanjutkan melalui verifikasi, pembaruan, dan integrasi dengan data masjid lainnya. Oleh karena itu, MUI Kota Tangerang diharapkan dapat memanfaatkan dan mengembangkan data yang telah dikumpulkan sebagai bagian dari basis Peta Dakwah serta melakukan pembaruan secara berkala. Pengelola masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) juga diharapkan berperan aktif dalam memperbarui dan melengkapi data masjid serta

mengembangkan potensi kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial yang dimiliki. Selain itu, pendataan perlu dilanjutkan secara bertahap agar seluruh masjid yang menjadi target dapat terdata secara lengkap, meliputi informasi lokasi, kondisi, aktivitas, dan potensi dakwahnya.

REFERENSI

- Asaad, M., Martial, T., & Darma, S. (2021). Buku ajar pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat. UISU Press.
- Ayu, N. C. S., RS, S., & Aziz, R. (2023). Pemberdayaan berbasis remaja masjid Al-Mujahidin Desa Ciater. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 6(4). <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i4.24290>
- Aziz, R. (2015). Urgensi peta dakwah. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 14(2), 356–372. <https://doi.org/10.15575/anida.v14i2.845>
- Egidiasafitri, E., & Kuswana, D. (2021). Pengelolaan masjid berbasis kampus dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 6(2), 175–190. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i2.33820>
- Hapsari, T. D., Patilaiya, H. L., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, J., Supriatna, A., Siburian, U. D., Mahaza, M., & Maesarini, I. W. (2022). Pemberdayaan masyarakat. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hidayat, A., Taufiq, A., Sunaryono, S., Munzil, M., Muhammad, H., & Subadra, S. U. I. (2024). Digital mosque management strengthening workshop to enhance the competence of mosque administrators in Malang City. Community Empowerment, 9(4), 727–732. <https://doi.org/10.31603/ce.11237>
- Laila, S. N., Rifa'i, A. B., & Azis, R. (2023). Strategi pemberdayaan Dewan Kemakmuran Masjid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perumahan. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 8(4), 455–474. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v8i4.25040>
- Masyhar, A., Arifin, R., & Fuad, A. N. (2019). Sertifikasi alih nadzir wakaf perorangan kepada nadzir badan hukum bagi masjid/musholla di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement), 2(1), 60–67. <https://doi.org/10.15294/jphi.v2i1.34054>
- Munir, M., & Ilaihi, W. (2021). Manajemen dakwah. Kencana.
- Qona'ati, A. F., Trifita, A., & Husniya, E. A. (2023). Peran fitur “Peta Dakwah” pada aplikasi “Dakwah MUI” dalam membangun peta dakwah di Surabaya. ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 14(1), 106–122. <https://doi.org/10.24235/orasi.v14i1.13530>
- Rachman, G. M., Lisdiyanto, A., & Pramana, A. L. (2024). Pengembangan sistem pemetaan masjid berbasis web Geographic Information System (GIS). Nusantara Computer and Design Review, 2(1), 31–36. <https://doi.org/10.55732/ncdr.v2i1.1293>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Rizki, J. W. S., & Siregar, E. Z. (2022). Manajemen komunikasi dakwah pemberdayaan masyarakat melalui Lazisnu Kota Padangsidempuan. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 21(2), 132–149. <https://doi.org/10.15575/anida.v21i2.14920>
- Saputri, A. Y., Susanti, T., & Huda, I. A. S. (2024). Pengembangan sistem informasi geografis masjid di Kelurahan Telanaipura, Kelurahan Legok dan Kelurahan Murni berbasis website. Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, 6(1), 84–93. <https://doi.org/10.36499/jinrpl.v6i1.9832>
- Tambunan, T. S. (2021). Pemberdayaan masyarakat: Menuju masyarakat cerdas. Expert.



- Wahab, A. J. (2017). Implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Harmoni*, 16(2), 307–323. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.8>
- Yakin, S. (2020). Peta dakwah Kecamatan Sawangan Kota Depok. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 24(2), 127–144. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v24i2.18341>